

Edukasi Agraria sebagai Upaya Preventif terhadap Konflik Lahan

Wargo¹, Kurniawan², Reza Okva Marwendi³, Nilfatri⁴, Wand⁵

¹ Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

^{2,3,4,5} Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, Jambi, Indonesia

Article Info

Article history:

Received 11 23, 2024

Revised 12 02, 2024

Accepted 12 15, 2024

Keywords:

Konflik

Agraria

Edukasi

Konflik

Preventif

ABSTRAK

Konflik agraria di Tanjung Jabung Timur berakar pada ketimpangan kekuasaan struktural antara masyarakat dan korporasi. Penelitian ini menganalisis efektivitas edukasi agraria sebagai upaya preventif konflik melalui pendekatan studi kasus kualitatif. Berlandaskan Teori Konflik dan paradigma kritis, temuan menunjukkan bahwa edukasi yang diinisiasi masyarakat berhasil meningkatkan kesadaran kritis, kapasitas advokasi, dan posisi tawar kolektif masyarakat. Meskipun demikian, efektivitasnya sebagai instrumen preventif murni terbatas oleh tantangan keberlanjutan dan kooptasi struktural, sehingga lebih berfungsi sebagai alat manajemen eskalasi konflik daripada pencegahan sengketa baru..

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Wargo

Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

Email: argowargo1@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Konflik agraria merupakan salah satu isu struktural paling persisten di Indonesia, yang berakar pada persaingan atas sumber daya lahan yang semakin langka. Eskalasi sengketa seringkali terjadi antara masyarakat lokal dengan korporasi skala besar, terutama di sektor perkebunan. Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi menjadi salah satu episentrum konflik ini, di mana ekspansi perkebunan kelapa sawit secara masif memicu pertentangan sengit. Ketimpangan kekuasaan yang tajam, asimetri informasi hukum, dan lemahnya pengakuan terhadap hak-hak adat menempatkan komunitas pada posisi rentan, menegaskan adanya ketidakadilan sistemik yang membutuhkan intervensi strategis.

Menghadapi ketidakadilan struktural tersebut, edukasi agraria muncul sebagai salah satu upaya intervensi yang berpotensi preventif. (Warda et al., 2024) Pendekatan ini tidak dipandang sebagai transfer pengetahuan semata, melainkan sebagai instrumen pemberdayaan untuk meningkatkan kesadaran kritis (Arif Musthofa & Ali, 2021) dan memperkuat posisi tawar masyarakat. Dengan membekali komunitas pengetahuan tentang hak, regulasi, dan strategi advokasi, edukasi bertujuan mengubah dinamika kekuasaan yang timpang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam efektivitas dan implementasi edukasi agraria sebagai upaya preventif konflik lahan, dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kerangka teoretis penelitian ini berlandaskan pada Teori Konflik, yang memandang masyarakat sebagai arena pertarungan antara kelompok-kelompok dengan kepentingan

yang berbeda atas sumber daya yang langka. Dalam konteks agraria, tanah menjadi sumber daya utama yang memicu persaingan. Teori ini, yang dipelopori oleh pemikir seperti Karl Marx dan Ralf Dahrendorf (Zulfiani et al., 2022) menjelaskan bahwa ketidaksetaraan dalam penguasaan dan akses terhadap lahan menciptakan ketegangan sosial yang inheren. Dinamika (Musthofa, 2024) ini menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana konflik lahan di Tanjung Jabung Timur muncul dari struktur sosial yang timpang.

Aplikasi Teori Konflik dalam studi ini secara spesifik menyoroti bagaimana sengketa lahan di Tanjung Jabung Timur merupakan manifestasi dari pertentangan kelas dan kekuasaan. Kelompok masyarakat lokal, petani, dan masyarakat adat seringkali berada dalam posisi yang lebih lemah berhadapan dengan korporasi atau bahkan aparaturnegara yang memiliki kekuatan modal dan legalitas formal. Ketimpangan akses terhadap informasi hukum, sumber daya ekonomi, dan jaringan politik ini mempertajam konflik, di mana perebutan kontrol atas lahan bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan juga pertarungan dominasi sosial.

Dalam kerangka ini, edukasi agraria diposisikan sebagai instrumen pemberdayaan untuk mengubah dinamika kekuasaan yang tidak seimbang. Pendidikan tidak dilihat sebagai proses netral, melainkan sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat. (Musthofa & Ali, 2021) Melalui pemahaman mendalam mengenai hak-hak atas tanah, regulasi yang berlaku, serta strategi advokasi, masyarakat dapat memperkuat posisi tawarnya. Edukasi ini berfungsi untuk membekali kelompok yang terpinggirkan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menavigasi dan menantang struktur yang menindas secara lebih efektif dan terorganisir.

Secara keseluruhan, Teori Konflik menyediakan landasan analisis yang kuat untuk memahami akar struktural dari sengketa pertanahan. Teori ini menjelaskan mengapa konflik bukan sekadar insiden sporadis, melainkan hasil dari ketidakadilan sistemik. Dengan demikian, intervensi melalui edukasi agraria menjadi relevan sebagai upaya preventif yang strategis. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan meredam konflik yang ada, tetapi juga memberdayakan komunitas untuk mengantisipasi dan melawan potensi perampasan hak di masa depan, sehingga mendorong terciptanya tatanan agraria yang lebih berkeadilan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus. Pilihan ini didasarkan pada tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, komprehensif, dan holistik mengenai fenomena edukasi agraria sebagai upaya preventif konflik lahan dalam konteks spesifik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara intensif dinamika sosial, interaksi antaraktor, serta proses implementasi edukasi dalam situasi dunia nyata yang kompleks. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengidentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh, tetapi juga menggali bagaimana variabel tersebut saling terkait dan membentuk suatu realitas sosial yang utuh terkait sengketa pertanahan di lokasi penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya untuk menangkap makna, persepsi, dan pengalaman subjektif dari para subjek penelitian, yaitu masyarakat lokal, aktivis, dan pihak-pihak terkait lainnya. Data yang dihasilkan bersifat deskriptif-analitis, berupa kata-kata tertulis atau lisan serta perilaku yang diamati. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali secara mendalam bagaimana edukasi agraria diterima, diinterpretasikan, dan diimplementasikan oleh masyarakat. Hal ini sangat relevan untuk memahami proses

perubahan kesadaran dan penguatan posisi tawar komunitas yang menjadi fokus utama dalam kerangka teoretis penelitian yang telah ditetapkan.

Secara lebih spesifik, penelitian ini mengadopsi paradigma kritis dalam pendekatannya. Selaras dengan Teori Konflik yang menjadi landasan, penelitian tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena, tetapi juga untuk menganalisis dan membongkar struktur kekuasaan yang timpang dan ketidakadilan sistemik yang melatari konflik lahan. Paradigma kritis memandang penelitian sebagai alat untuk emansipasi dan pemberdayaan. Oleh karena itu, proses penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi bagaimana edukasi agraria dapat berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat, sehingga mereka mampu menantang struktur dominan dan memperjuangkan hak-hak agraria mereka secara lebih efektif dan terorganisasi.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah ini merupakan salah satu episentrum konflik agraria di Indonesia, yang ditandai oleh tingginya eskalasi sengketa antara masyarakat lokal dengan perusahaan perkebunan skala besar, terutama kelapa sawit. Dinamika konflik di Tanjung Jabung Timur secara representatif mencerminkan pertarungan atas sumber daya lahan yang langka, sebagaimana dianalisis dalam kerangka teori konflik. Selain itu, di wilayah ini telah berlangsung berbagai inisiatif edukasi agraria yang diinisiasi oleh organisasi masyarakat sipil, menjadikannya konteks yang sangat relevan untuk studi kasus ini.

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari berbagai aktor yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam dinamika konflik lahan dan proses edukasi agraria. Subjek utama adalah anggota masyarakat lokal dan petani di desa-desa yang terdampak konflik, yang menjadi peserta program edukasi. Kelompok subjek kedua adalah para aktivis dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang berperan sebagai fasilitator dan penyelenggara edukasi agraria. Untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif, penelitian ini juga melibatkan informan dari pihak perusahaan yang beroperasi di wilayah sengketa serta perwakilan dari aparat pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling (Suriani & Jailani, 2023). Kriteria utama dalam pemilihan subjek adalah keterlibatan dan pengetahuan mendalam mereka terhadap isu yang diteliti. Informan dari kalangan masyarakat dipilih berdasarkan pengalaman langsung mereka dalam menghadapi sengketa lahan dan partisipasi aktif dalam program edukasi. Sementara itu, aktivis, perwakilan perusahaan, dan aparat pemerintah dipilih karena posisi strategis dan peran fungsional mereka dalam proses konflik dan edukasi. Teknik ini kemudian dikombinasikan dengan metode snowball sampling, di mana informan kunci merekomendasikan subjek lain yang dianggap memiliki informasi relevan untuk memperkaya data penelitian.

Metode utama pengumpulan data adalah wawancara mendalam (Santoso et al., 2022) yang bersifat semi-terstruktur. Teknik ini digunakan untuk menggali informasi secara komprehensif mengenai persepsi, pengalaman, dan pemaknaan subjek penelitian terhadap konflik lahan dan program edukasi agraria. Peneliti menggunakan pedoman wawancara yang fleksibel, memungkinkan pertanyaan berkembang sesuai dengan konteks dan jawaban informan. Wawancara dilakukan dengan berbagai aktor, termasuk masyarakat terdampak, aktivis LSM, perwakilan perusahaan, dan aparat pemerintah. Tujuannya adalah untuk menangkap keragaman perspektif dan memahami secara mendalam dinamika kekuasaan serta efektivitas edukasi dari sudut pandang yang berbeda.

Untuk melengkapi data dari wawancara, peneliti juga menerapkan metode observasi partisipatif (Mustanir et al., 2019). Peneliti akan terlibat secara langsung dalam beberapa aktivitas komunitas, seperti pertemuan desa, sesi pelatihan edukasi agraria, dan kegiatan

sehari-hari masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lahan. Keterlibatan ini bertujuan untuk mengamati secara langsung interaksi sosial, dinamika kekuasaan yang terjadi, serta proses implementasi edukasi agraria dalam konteks alamnya. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh data kontekstual yang kaya dan memverifikasi informasi yang didapat dari wawancara, sehingga pemahaman terhadap fenomena menjadi lebih holistik dan mendalam, menangkap aspek-aspek yang tidak terucap.

Metode pengumpulan data ketiga adalah studi dokumentasi. Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti akan menganalisis berbagai dokumen, seperti peraturan perundang-undangan terkait agraria, surat keputusan izin lokasi perusahaan, materi atau modul edukasi yang digunakan oleh LSM, laporan tahunan perusahaan, kliping berita media massa mengenai sengketa lahan di Tanjung Jabung Timur, serta dokumen-dokumen resmi dari pemerintah daerah dan BPN. Data dokumenter ini berfungsi sebagai alat triangulasi untuk memvalidasi temuan dari wawancara dan observasi, serta memberikan landasan faktual dan historis.

Analisis data dalam penelitian ini mengadopsi model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman (Miles & Huberman, 1994), yang mencakup tiga komponen utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap pertama, reduksi data, merupakan proses seleksi, pemfokusan, dan abstraksi data mentah yang diperoleh dari transkrip wawancara, catatan lapangan observasi, dan dokumen. Dalam tahap ini, peneliti melakukan pengkodean (coding) secara terbuka dan tematik untuk mengidentifikasi pola-pola signifikan yang berkaitan dengan dinamika konflik, struktur kekuasaan, dan implementasi edukasi agraria. Proses ini bertujuan untuk mempertajam, menggolongkan, dan mengorganisasi data agar lebih terkelola dan bermakna.

Langkah kedua adalah penyajian data (data display), di mana informasi yang telah direduksi disajikan dalam bentuk yang terorganisir dan padat. Peneliti akan menggunakan format seperti matriks, diagram, dan narasi deskriptif untuk menyajikan data secara sistematis. Misalnya, sebuah matriks dapat digunakan untuk membandingkan persepsi antara masyarakat, aktivis, dan pihak perusahaan mengenai efektivitas program edukasi. Penyajian data yang efektif ini memungkinkan peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan, memahami hubungan antar variabel, dan mengidentifikasi pola-pola yang muncul, sehingga menjadi dasar yang kuat untuk melakukan analisis yang lebih mendalam dan menarik kesimpulan yang valid.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification). Berdasarkan data yang telah disajikan dan dianalisis, peneliti merumuskan kesimpulan sementara yang kemudian diuji kebenarannya secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Untuk memastikan kredibilitas temuan, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode. Ini dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi dan dokumen terkait. Proses verifikasi ini sangat penting untuk membangun temuan yang kokoh dan dapat dipercaya, serta untuk memastikan bahwa interpretasi mengenai peran edukasi agraria sebagai upaya preventif konflik lahan didasarkan pada bukti empiris yang kuat..

3. HASIL DAN DISKUSI

3.1. Dinamika Konflik Lahan di Tanjung Jabung Timur: Analisis Ketimpangan Kekuasaan dan Akses

Hasil analisis data wawancara dan studi dokumentasi menunjukkan bahwa dinamika konflik di Tanjung Jabung Timur berakar pada ketimpangan kekuasaan yang

tajam. Di satu sisi, korporasi perkebunan didukung oleh legalitas formal berupa Hak Guna Usaha (Rofy, 2025) modal finansial yang besar, dan akses kuat ke jaringan politik. Di sisi lain, masyarakat lokal dan petani hanya berpegang pada hak-hak historis dan adat yang seringkali tidak diakui dalam sistem hukum positif. Temuan ini selaras dengan Teori Konflik yang menggarisbawahi pertarungan atas sumber daya langka.

Wawancara mendalam dengan petani mengungkap adanya asimetri informasi yang signifikan sebagai salah satu pilar ketimpangan. Masyarakat lokal umumnya tidak memahami prosedur hukum agraria, isi detail izin HGU perusahaan, maupun cara mengakses peta resmi. Sebaliknya, korporasi memiliki tim legal yang menguasai regulasi. Observasi pada beberapa pertemuan desa mengonfirmasi kebingungan warga dalam menavigasi birokrasi pertanahan yang rumit. Ketimpangan akses terhadap informasi ini secara efektif melumpuhkan kemampuan masyarakat untuk mempertahankan hak-hak mereka secara formal dan terstruktur.

Manifestasi ketimpangan kekuasaan ini terlihat jelas di lapangan melalui praktik intimidasi dan kriminalisasi terhadap petani yang mencoba mempertahankan lahannya. Data wawancara dan observasi menunjukkan bahwa proses mediasi seringkali berjalan tidak seimbang, dengan aparat keamanan yang cenderung memihak kepentingan perusahaan. Fenomena ini mengonfirmasi bagaimana struktur kekuasaan yang timpang menciptakan kondisi rentan bagi masyarakat. Perlawanan sporadis yang dilakukan warga merupakan respons langsung terhadap ketidakadilan struktural ini, menegaskan adanya pertentangan inheren yang membutuhkan intervensi pemberdayaan.

3.2. Implementasi dan Bentuk Edukasi Agraria sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi edukasi agraria di Tanjung Jabung Timur diinisiasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai respons langsung terhadap ketimpangan kekuasaan. Edukasi ini tidak berbentuk pengajaran formal, melainkan lokakarya partisipatif dan diskusi kelompok terfokus. Observasi partisipatif dalam sesi pelatihan mengungkap bahwa metode ini dirancang untuk membangun dialog dan kesadaran kolektif, bukan sekadar transfer informasi satu arah. Fasilitator dari LSM berperan sebagai pemantik diskusi, mendorong petani untuk berbagi pengalaman dan menganalisis akar masalah konflik yang mereka hadapi.

Materi edukasi yang digunakan, sebagaimana dianalisis dari studi dokumentasi modul pelatihan, berfokus pada tiga pilar utama: pemahaman hak-hak agraria berdasarkan hukum positif dan adat, teknik pemetaan partisipatif (Wibowo et al., 2020), serta strategi advokasi non-kekerasan. Wawancara dengan fasilitator LSM mengonfirmasi bahwa kurikulum ini dirancang secara spesifik untuk membongkar asimetri informasi yang dialami masyarakat. Dengan membekali warga pengetahuan legal dan teknis, program ini secara langsung menantang dominasi informasi yang selama ini dipegang oleh korporasi dan aparat.

Proses edukasi ini secara sadar diposisikan sebagai instrumen pemberdayaan, sejalan dengan paradigma kritis penelitian. Selain diskusi teoretis, program ini melibatkan praktik langsung seperti pemetaan wilayah adat secara partisipatif dan simulasi mediasi. Wawancara dengan peserta menunjukkan bahwa kegiatan praktik ini sangat efektif dalam membangun kepercayaan diri dan keterampilan kolektif. Edukasi tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga alat konkret bagi masyarakat untuk mengorganisir diri, mendokumentasikan klaim mereka, dan mempersiapkan diri untuk bernegosiasi dari posisi yang lebih kuat.

3.3. Peningkatan Kesadaran Kritis dan Posisi Tawar Masyarakat Pasca-Edukasi Agraria

Dampak paling signifikan dari edukasi agraria adalah tumbuhnya kesadaran kritis di kalangan masyarakat. Hasil wawancara mendalam menunjukkan pergeseran cara pandang, dari melihat sengketa sebagai masalah individual menjadi pemahaman bahwa konflik ini bersifat struktural. Petani yang sebelumnya pasrah, kini mampu mengidentifikasi ketidakadilan dalam kebijakan dan praktik korporasi. Kesadaran ini menjadi fondasi bagi perubahan sikap, di mana mereka tidak lagi hanya menjadi objek pasif, melainkan subjek aktif yang memahami akar permasalahan dan posisi mereka dalam struktur kekuasaan yang timpang.

Peningkatan kesadaran kritis ini secara langsung berimplikasi pada penguatan posisi tawar kolektif. Observasi partisipatif menunjukkan bahwa masyarakat mulai mengorganisir diri secara lebih sistematis. Berbekal pengetahuan hukum dan data pemetaan partisipatif yang dihasilkan selama pelatihan, mereka mampu menyusun argumen yang lebih solid dalam forum mediasi dengan perusahaan dan pemerintah. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan klaim historis lisan, tetapi juga bukti terdokumentasi yang memperkuat legitimasi tuntutan mereka, sehingga mengubah dinamika negosiasi menjadi lebih seimbang.

Lebih jauh, edukasi agraria terbukti berhasil membangun modal sosial dan psikologis komunitas. Wawancara dengan peserta program mengungkap adanya peningkatan kepercayaan diri dan keberanian untuk bersuara. Rasa takut terhadap intimidasi berkurang karena adanya solidaritas kolektif yang terbangun melalui proses belajar bersama. Penguatan ikatan sosial ini menjadi aset krusial yang membuat perlawanan mereka lebih berkelanjutan. Pemberdayaan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga emansipatoris, membebaskan masyarakat dari perasaan tidak berdaya dalam menghadapi kekuatan yang lebih besar.

3.4 Tantangan dan Efektivitas Edukasi Agraria dalam Mencegah Konflik Lahan Struktural

Meskipun efektif dalam meningkatkan kapasitas komunitas, edukasi agraria menghadapi tantangan signifikan berupa kooptasi oleh struktur kekuasaan yang ada. Hasil wawancara dengan aparat pemerintah dan perwakilan perusahaan menunjukkan adanya upaya untuk mengarahkan energi kritis masyarakat ke dalam mekanisme mediasi formal yang seringkali tidak berimbang. Efektivitas edukasi sebagai upaya preventif menjadi terbatas, karena ia lebih berhasil dalam mengelola eskalasi konflik yang sudah ada daripada mencegah munculnya sengketa baru yang berakar pada kebijakan struktural yang pro-investasi dan mengabaikan hak-hak adat masyarakat.

Tantangan krusial lainnya adalah keberlanjutan program edukasi itu sendiri. Data observasi dan wawancara dengan aktivis LSM menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada pendanaan eksternal dan kehadiran fasilitator. Ketika proyek berakhir, momentum pengorganisasian dan pembelajaran kolektif berisiko menurun. Hal ini membatasi efektivitas jangka panjangnya sebagai instrumen preventif. Tanpa adanya kaderisasi lokal yang kuat dan kemandirian komunitas untuk melanjutkan proses edukasi kritis secara mandiri, upaya pencegahan konflik di masa depan menjadi rentan dan tidak berkelanjutan.

Efektivitas edukasi agraria juga diuji oleh dinamika internal komunitas. Wawancara mendalam mengungkap adanya potensi elite capture (Shohibuddin & Bahri, 2019), di mana beberapa tokoh masyarakat yang berpengaruh dapat dibujuk oleh perusahaan, sehingga menciptakan faksionalisme internal. Kondisi ini melemahkan solidaritas kolektif yang telah dibangun. Dengan demikian, edukasi tidak selalu mampu mencegah konflik secara menyeluruh karena ia tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan perpecahan sosial yang sudah ada. Pencegahan konflik struktural terbukti membutuhkan tidak hanya kesadaran kritis, tetapi juga penguatan tata kelola internal komunitas.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa edukasi agraria di Tanjung Jabung Timur terbukti menjadi instrumen pemberdayaan yang efektif dalam merespons ketimpangan kekuasaan yang menjadi akar konflik lahan. Sejalan dengan Teori Konflik, edukasi ini berhasil mengubah dinamika pertarungan dengan membongkar asimetri informasi dan meningkatkan kesadaran kritis masyarakat. Melalui metode partisipatif, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan hukum dan keterampilan teknis seperti pemetaan, tetapi juga membangun solidaritas kolektif. Transformasi ini secara signifikan memperkuat posisi tawar komunitas, mengubah mereka dari objek pasif menjadi subjek aktif yang mampu menantang struktur dominan secara lebih terorganisir.

Meskipun demikian, studi ini juga menemukan bahwa efektivitas edukasi agraria sebagai upaya preventif jangka panjang menghadapi tantangan signifikan. Keberhasilannya dibatasi oleh faktor eksternal seperti kooptasi oleh struktur kekuasaan yang ada dan ketergantungan pada fasilitator eksternal, serta faktor internal berupa kerentanan terhadap perpecahan komunitas. Oleh karena itu, agar edukasi dapat berfungsi secara preventif dan berkelanjutan, intervensi ini harus melampaui pemberdayaan komunitas semata. Diperlukan strategi komplementer yang mencakup penguatan kelembagaan lokal secara mandiri dan advokasi kebijakan yang mampu mereformasi struktur agraria agar lebih berpihak pada hak-hak masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Musthofa, M., & Ali, H. (2021). Factors Influencing Critical Thinking in Islamic Education in Indonesia: System, Tradition, Culture. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(1), 1–19.
- Devi, E. K., Ma'ani, B., & Wahab, H. A. (2023). Strategi Pemasaran Layanan Jasa Mobile Banking Bank 9 Jambi Syariah Kantor Cabang Muara Sabak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2187-2196.
- Dewi, H., & Febrianto, H. (2023). Implementasi Fuzzy C-Means untuk Clustering Data dalam Sistem Informasi Promosi (Studi Kasus di SMAN Negeri 4 Tanjung Jabung Timur). *Jurnal Teknik Informatika UNIKA Santo Thomas*, 328-340.
- Djaja, D. K., Elfina, H., Najdah, N., Razali, G., Munip, A., & Muhammadong, M. (2023). PENGARUH PENDIDIKAN KARAKTER TERHADAP KEPERCAYAAN DIRI MAHASISWA DI UNIVERSITAS. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 6(2), 151-156
- Hidayat, A., Hardi, E. A., Sucipto, S., & Sunarti, Z. (2023). Analisis Pergerakan Harga Saham Emiten Sawit Terindeks Saham Syariah Indonesia Saat Larangan Ekspor CPO. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1-7.
- Hidayat, A., Mubyarto, N., Ritonga, A. H., & Sunarti, Z. (2023). Indeks Saham Syariah Indonesia: Pengaruh Faktor Makro Ekonomi Di Masa Pandemi Dan Pasca Pandemi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3829-3838.
- Kadarsih, S., Munip, A., Aminah, S., & Rahmy, H. A. (2023). Strategi Guru Pembimbing Dalam Pembentukan Kemandirian Anak Usia Dini. *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*, 7(2), 114-131.

- Karnadjaja, D. (2023). Strategi penguatan pendidikan karakter pada tingkat SLTA melalui model pembelajaran project based learning. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 6(2), 26-55.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Mustanir, A., Hamid, H., & Syarifuddin, R. N. (2019). Pemberdayaan kelompok masyarakat desa dalam perencanaan metode partisipatif. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(3), 227–239.
- Musthofa, M. A. (2024). Dinamika Kelisanan dan Keaksaraan dalam Produksi dan Resepsi Literatur Keagamaan Masyarakat Hadhrami di Tanah Jambi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 23(1), 17–34.
- Musthofa, M. A., & Ali, H. (2021). Faktor yang mempengaruhi berpikir kritis dalam pendidikan Islam di Indonesia: Kesisteman, tradisi, budaya. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(1), 1–19.
- Mustofa, M. A. (2023). Upaya Petani Sawit Dalam Meningkatkan Perekonomian Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sungai Sayang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3257-3266.
- Rofy, A. M. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Guna Usaha (Hgu) Dalam Konflik Pertanahan Menurut Hukum Di Indonesia.
- Santoso, S., Kusnanto, E., & Saputra, M. R. (2022). Perbandingan metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif serta aplikasinya dalam penelitian akuntansi interpretatif. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 351–360.
- Shohibuddin, M., & Bahri, A. D. (2019). Perjuangan keadilan agraria. *INSISTPress*.
- Suriani, N., & Jailani, M. S. (2023). Konsep populasi dan sampling serta pemilihan partisipan ditinjau dari penelitian ilmiah pendidikan. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 24–36.
- Warda, N., Faqih, A., Kurniawan, A., Nurshadrina, D. S., Widyaningsih, D., & Kusumandari, S. A. (2024). Mengisi Kekosongan dalam Sistem Perlindungan Sosial di Papua: Pentingnya Perlindungan Sosial Adaptif untuk Membangun Ketangguhan Orang Asli Papua.
- Wibowo, R. C., Karyanto, K., Zaenudin, A., & Sarkowi, M. (2020). Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada Studi Pemetaan Partisipatif dalam Pembuatan Jalur Evakuasi Bencana Tsunami di Desa Wisata Pagar Jaya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan*, 4(1), 43–48.
- Zulfiani, Y. N., Farhana, N., & Oktavianingrum, W. (2022). Relevansi Teori Karl Marx Dan Ralf Dahrendorf Dalam Implementasi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Sebagai Alat Perwujudan Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Dialektika Hukum*, 4(1), 40–57.